

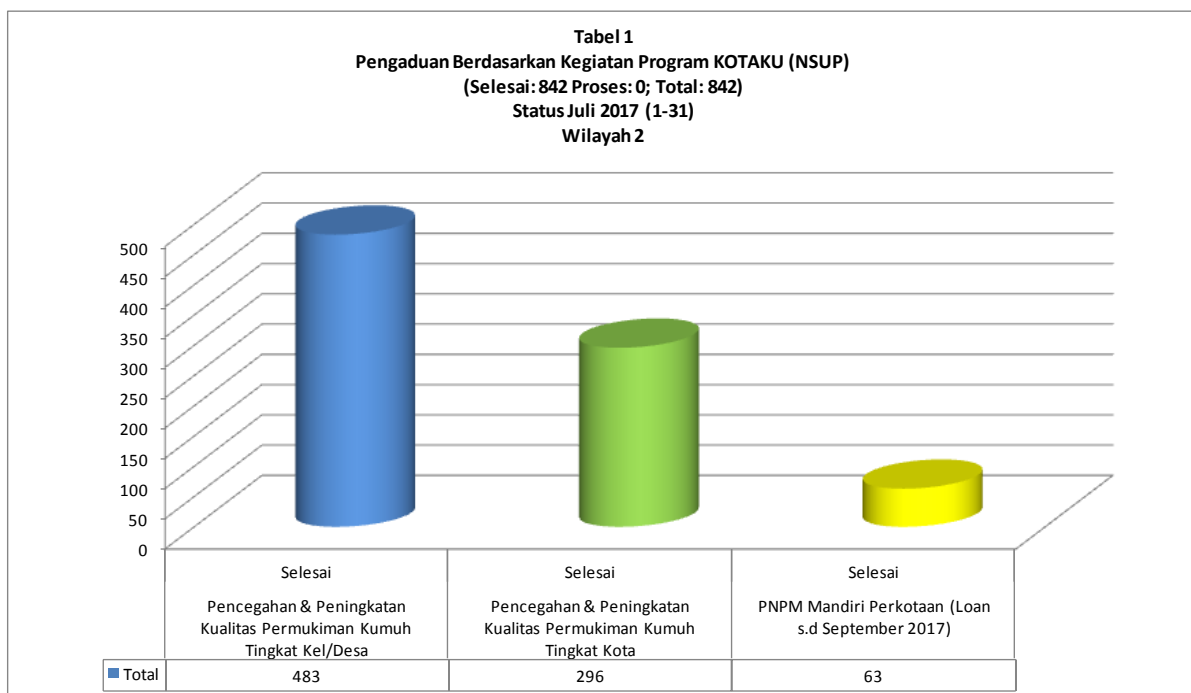
**Progres PPM Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode Juli 2017
Wilayah 2
(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9)**

Pendahuluan

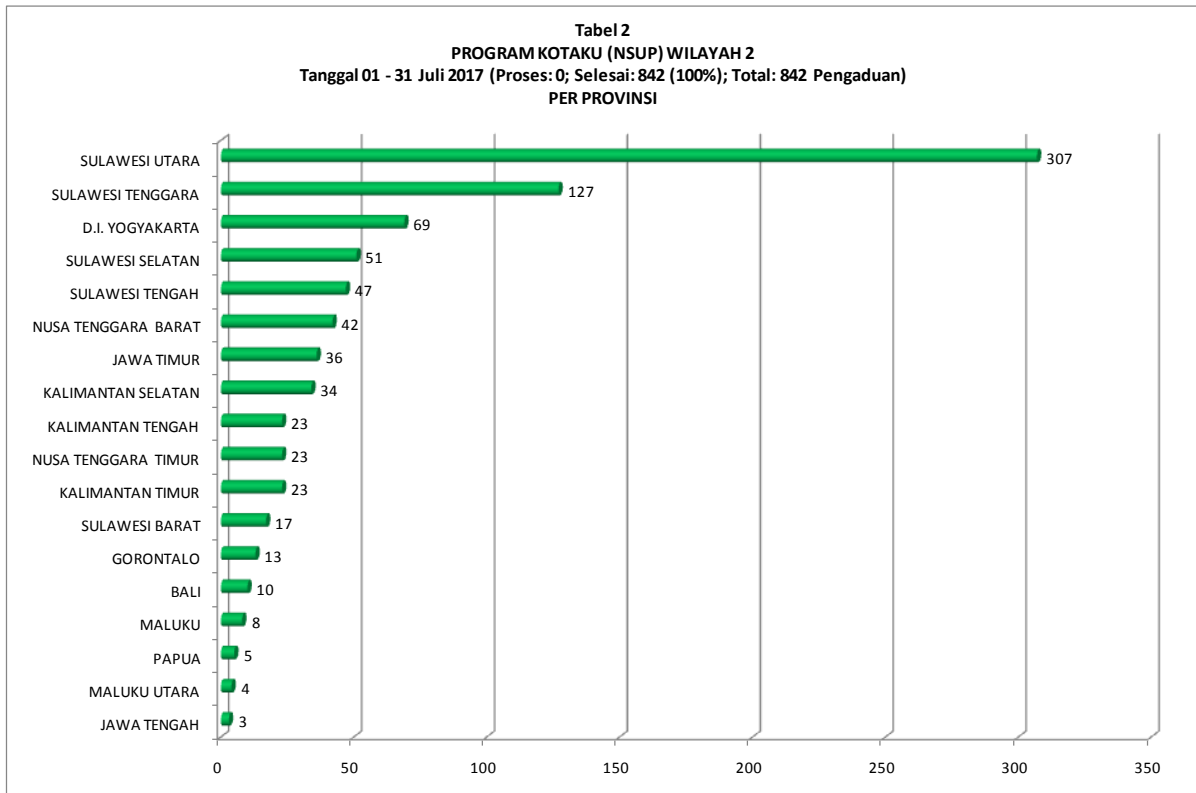
Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2. Adapun dalam mengelola data hasil PPM ini menggunakan manual Ms. Excel, karena aplikasi SIM PPM direncanakan ke depan berbasis on-line dan segera diluncurkan.

Pada bulan Juli 2017, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 (dua) berjumlah 842 pengaduan (selesai 842 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Progres pengaduan di bulan Juli 2017 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan



dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota yang didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (152 pengaduan) dan Provinsi DI Yogyakarta (26 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.



Pada tabel 2 terlihat bahwa tidak seluruh Provinsi ada pengaduannya, yang mengirim data pengaduan tetapi tidak ada pengaduan yang terjadi di bulan Juli 2017 adalah Provinsi Papua Barat.

A. Progres PPM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2

Periode Juli 2017

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 yang terjadi pada tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2017, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 842 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 842 (100%) pengaduan dan status proses sejumlah 0 (0%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 830 (98,6%) [selesai 830 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 12 (1,4%) [selesai 12 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Tabel 3

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah) PROGRAM KOTAKU (NSUP) Wilayah 2 01 Juli 2017 - 31 Juli 2017				
INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	19	-	19
2	Saran	43	-	43
3	Pertanyaan	768	-	768
Sub Total		830	-	830
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	2	-	2
2	Penyimpangan Dana	-	-	-
3	Intervensi Negatif	4	-	4
4	Perubahan Kebijakan	2	-	2
5	Kode Etik	3	-	3
6	Force Majeur	1	-	1
Sub Total		12	-	12
TOTAL		842	-	842
Persentase		100,0%	0,0%	

Sumber: Data SIM PPM 31 Juli 2017

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Juli – 31 Juli 2017 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 0,2% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%. (Lihat tabel 4)

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 31 Juli 2017 Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

Provinsi	Jml Kel	Jml	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah	1.983	3	0,2	3	100,0	-	-
DI Yogyakarta	178	69	39	69	100,0	-	-
Jawa Timur	1.857	36	2	36	100,0	-	-
Bali	130	10	8	10	100,0	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	42	19	42	100,0	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	23	18	23	100,0	-	-
Kalimantan Tengah	41	23	56	23	100,0	-	-
Kalimantan Selatan	239	34	14	34	100,0	-	-
Kalimantan Timur	145	23	16	23	100,0	-	-
Sulawesi Utara	307	307	100,0	307	100,0	-	-
Sulawesi Tengah	58	47	81	47	100,0	-	-
Sulawesi Selatan	321	51	16	51	100,0	-	-
Sulawesi Tenggara	129	127	98	127	100,0	-	-
Gorontalo	73	13	18	13	100,0	-	-
Sulawesi Barat	17	17	100	17	100,0	-	-
Maluku	84	8	10	8	100,0	-	-
Maluku Utara	152	4	3	4	100,0	-	-
Papua Barat	41	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Papua	39	5	13	5	100,0	-	-
Total	6.143	842	14	842	100,0	0	0,0

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 31 Juli 2017 sebesar 14%.

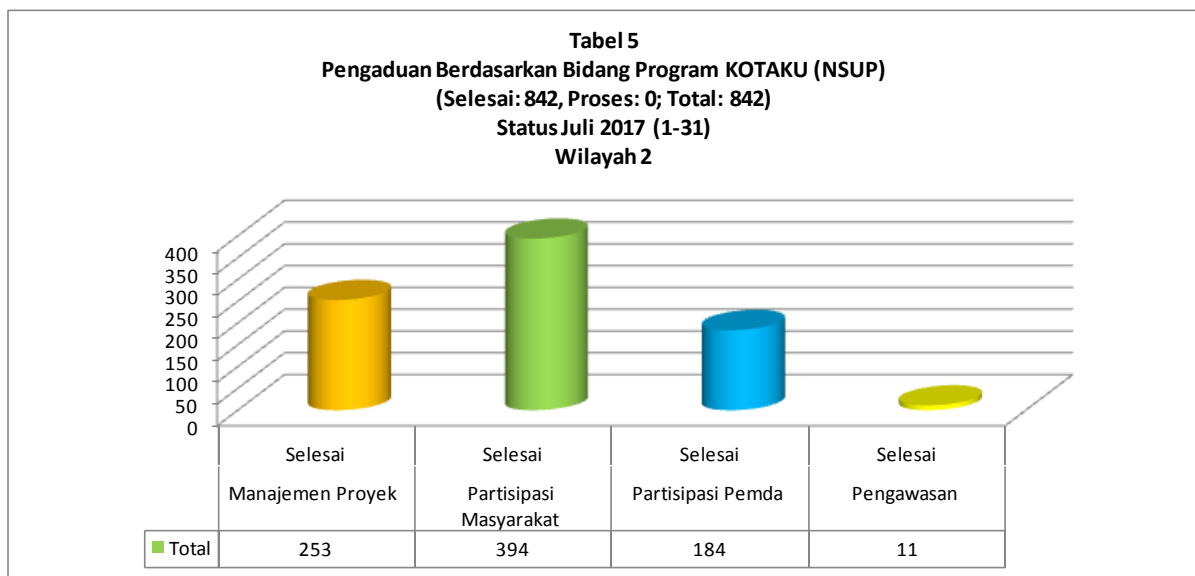
Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Tengah (0,2%), Jawa Timur (2%), Bali (8%), Maluku Utara (3%), dan Papua Barat (0%).

Secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Juli 2017 jumlah pengaduan yang masuk ada 842 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 100%.

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

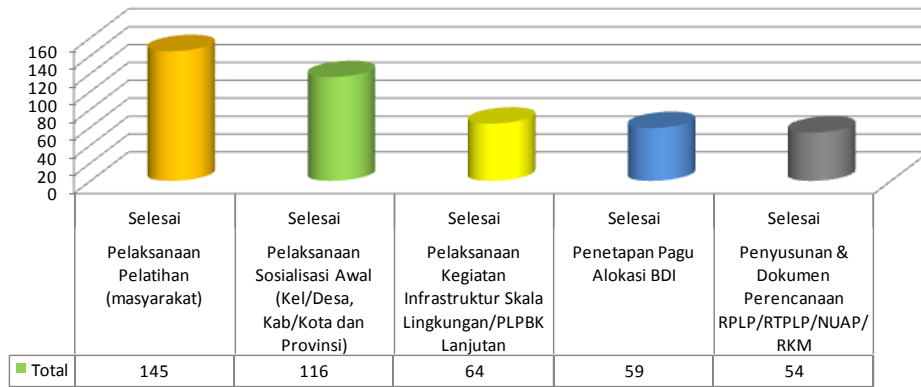
Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) pengawasan, (2) manajemen proyek, (3) partisipasi Pemda, dan (4) partisipasi masyarakat. Bidang pengaduan tersebut tercakup dalam lingkup administrasi teknis dan keuangan. Adapun lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). termasuk administrasi penyaluran BDI (bantuan dana investasi). Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pembayaran dan pemanfaatan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) di wilayah masing-masing.

Pada tabel 5 untuk pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 253 pengaduan (selesai 253 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 394 pengaduan (selesai 394 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 184 pengaduan (selesai 184 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 11 pengaduan (selesai 11 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).



Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

Tabel 6
5 (lima) tema Pengaduan Dominan Berdasarkan Sifat Aduan *Informatif* dan Sub Bidang Sebanyak 438 Pengaduan dan Tema Lainnya sebanyak 392 pengaduan total 830 pengaduan
Tanggal 01 Juli s.d 31 Juli 2017
Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

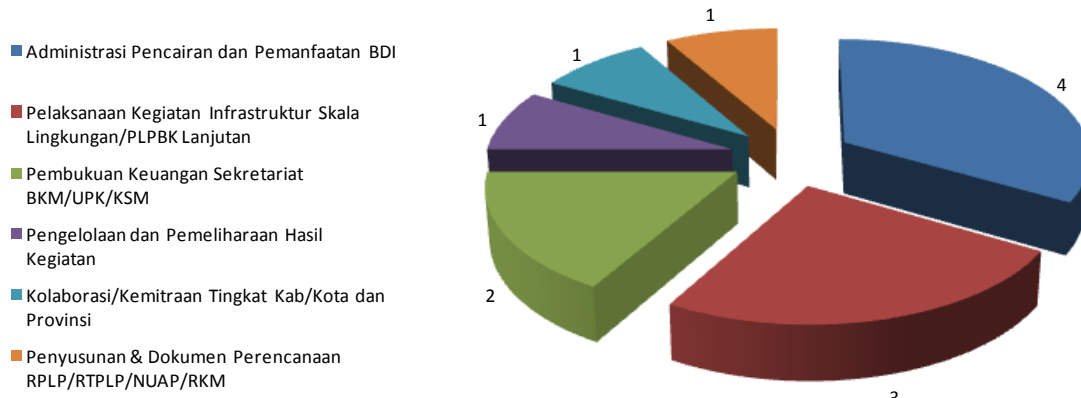


Selengkapnya lihat tabel 6a per provinsi.

Tema	Provinsi																	Grand Total	
	BALI	D.I. YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA		
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	3	17	2	3	9	1				5	1		2	7	18	20	57	145	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8		1	1					3				6	1		96	116	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan		3	2	5	5	3	1	5		2	2	1	4	4		14	13	64	
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1	1	1	2		2	1		11	1		1	3		14	22	59	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1	3		1	1	4	1	1		1	1		1	4	8	9	18	54	
Grand Total	4	32	4	2	10	21	5	4	6	1	22	4	2	7	24	27	57	206	438

Pada kategori yang bersifat masalah pada bulan Juli 2017 pengaduan sebanyak 12 pengaduan (selesai 12 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Lihat tabel 7.

Tabel 7
Pengaduan Berdasarkan Sifat Aduan *Masalah* dan Sub Bidang
total 12 pengaduan
Tanggal 01 Juli s.d 31 Juli 2017
Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2



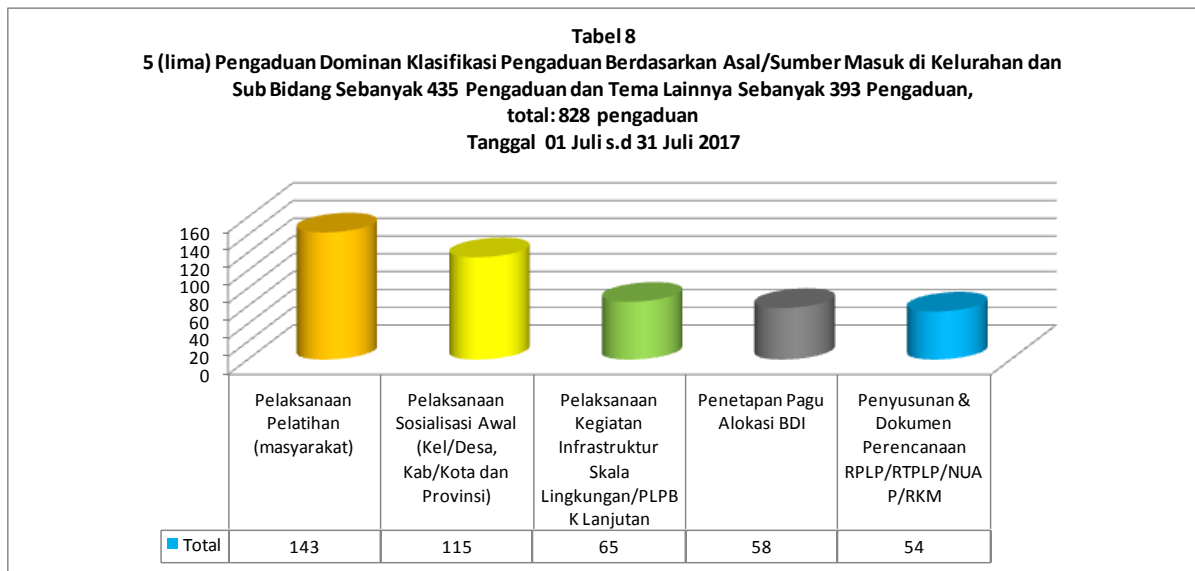
Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

MASALAH/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	G O R O N T A L O	K A L I M A N T A N T I M U R	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
Administrasi Pencairan dan Pemanfaatan BDI					3		1	4
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan		1	1	1				3
Pembukuan Keuangan Sekretariat BKM/UPK/KSM		1				1		2
Pengelolaan dan Pemeliharaan Hasil Kegiatan	1							1
Kolaborasi/Kemitraan Tingkat Kab/Kota dan Provinsi				1				1
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM			1					1
Grand Total	1	2	2	2	3	1	1	12

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan Juli 2017 dengan 5 (lima) pengaduan dominan ada 435 pengaduan dan tema lainnya ada 393 pengaduan (total selesai 828 pengaduan).



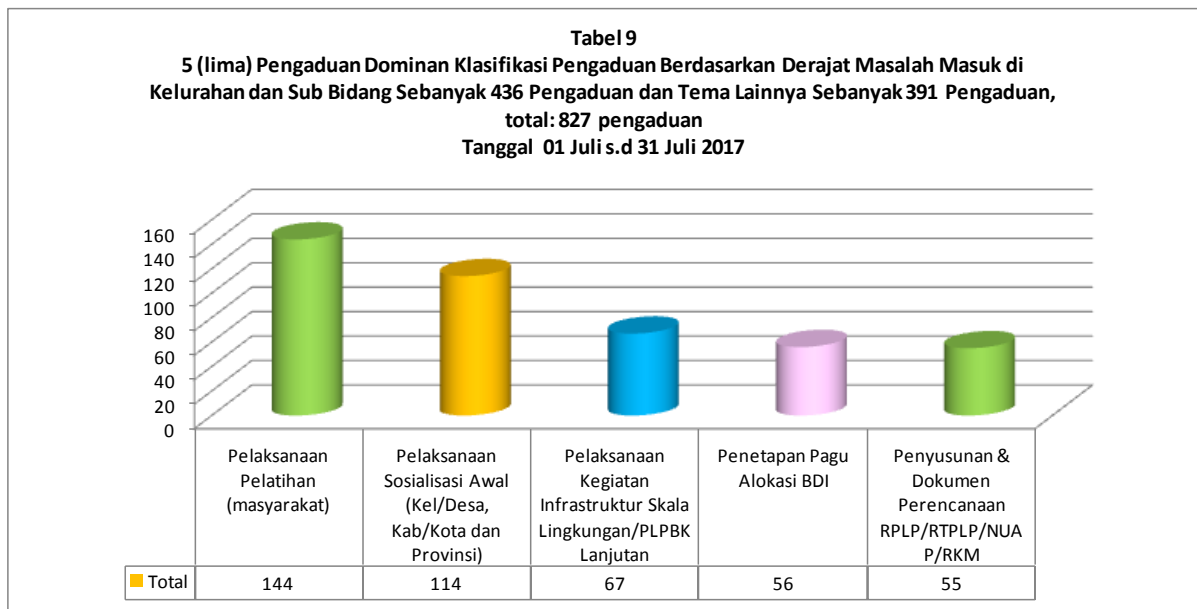
Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

SUMBER ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 8a														Grand Total				
	BALIK NEGERI	DIYOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NTENGGARA BARAT	NTENGGARA TIMUR	PAPUA	SULAWESI BARAT		SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	3	17	2	3	8	1				5	1		2	7	18	20	56	143	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8				1					3				6	1		96	115
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan		3	2		5	5	3	2	5		2	3	2	4	4		14	11	65
Penetapan Pagu Alokasi BDI			1		1		2		1	1		11	1		1	3	14	22	58
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1	3		1	1	4	1	1		1	1	1	1		4	8	9	17	54
Grand Total	4	32	4	2	9	20	5	4	6	1	22	6	3	7	24	27	57	202	435

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.

Pada bulan Juli 2017 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan dengan 5 (lima) pengaduan dominan sejumlah 436 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 391 pengaduan (total 827 pengaduan).



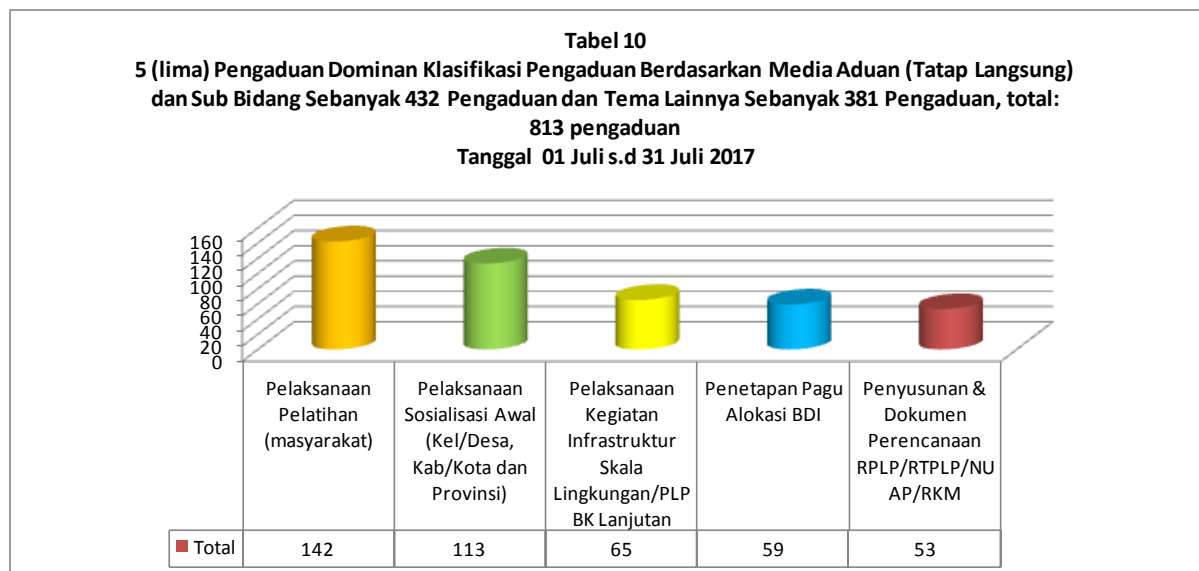
Tabel 9a di bawah berdasarkan per provinsi.

DERAJAT/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	B	D	G	J	J	K	K	K	M	M	N	N	P	S	S	S	S	S	G	r
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	3	17	2		3	8	1				5	1		2	7	18	20	57	144	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8				1					2				6	1		96	114	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan		3	2		5	5	3	2	5		2	3	2	4	4		14	13	67	
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1		1		2		1	1		9	1		1	3		14	22	56	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1	3		1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	8	9	18	55		
Grand Total	4	32	4	2	9	20	5	4	6	1	19	6	3	7	24	27	57	206	436	

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan tigabelas media untuk mengadu, media tersebut terdiri atas: Tatap Langsung, Buku Pengaduan, Kotak Pengaduan, Telepon, SMS, Faksimil, Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan data pada bulan Juli 2017 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 432 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 381 pengaduan (total 813 pengaduan).



Tabel 10a di bawah berdasarkan per provinsi.

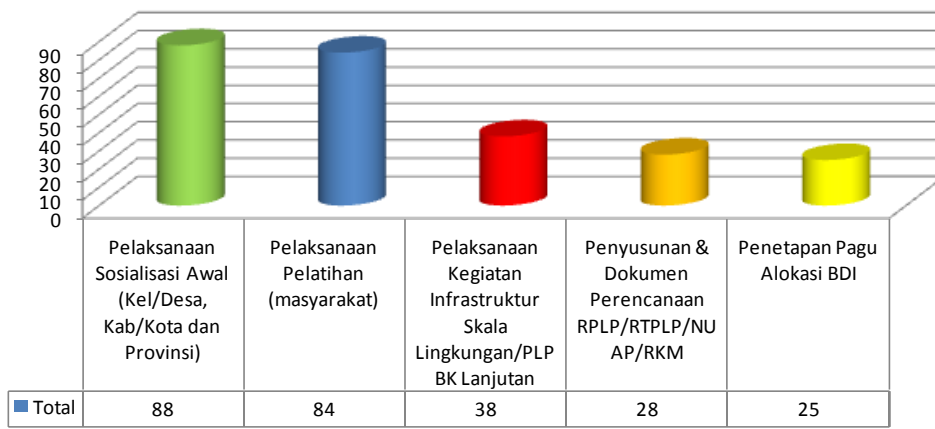
Tabel 10A		MEDIA ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2																	
	BAL I	D . I . Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K U	M A L U K U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	3	16	2		3	9					4	1		2	7	18	20	57	142
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8			1	1					3				6	1		93	113
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan		3	2		5	5	2	2	5		2	3	1	4	4		14	13	65
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1		1		2		2	1		11	1		1	3		14	22	59
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1	3		1	1	4	1			1	1	1			4	8	9	18	53
Grand Total	4	31	4	2	10	21	3	4	6	1	21	6	1	7	24	27	57	203	432

7. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan

Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek, dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada bulan Juli 2017 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah Fasilitator Kelurahan/Senior Fasilitator (Faskel/SF) dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 263 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 185 pengaduan (total 448 pengaduan).

Tabel 11
5 (lima) Tema Dominan Klasifikasi pengaduan berdasarkan pelaku yang diadukan (Faskel/SF)
dan Sub Bidang Sebanyak 263 Pengaduan dan Tema Pengaduan Lainnya Sebanyak 185
Pengaduan, total: 448 pengaduan
Tanggal 01 Juli s.d 31 Juli 2017



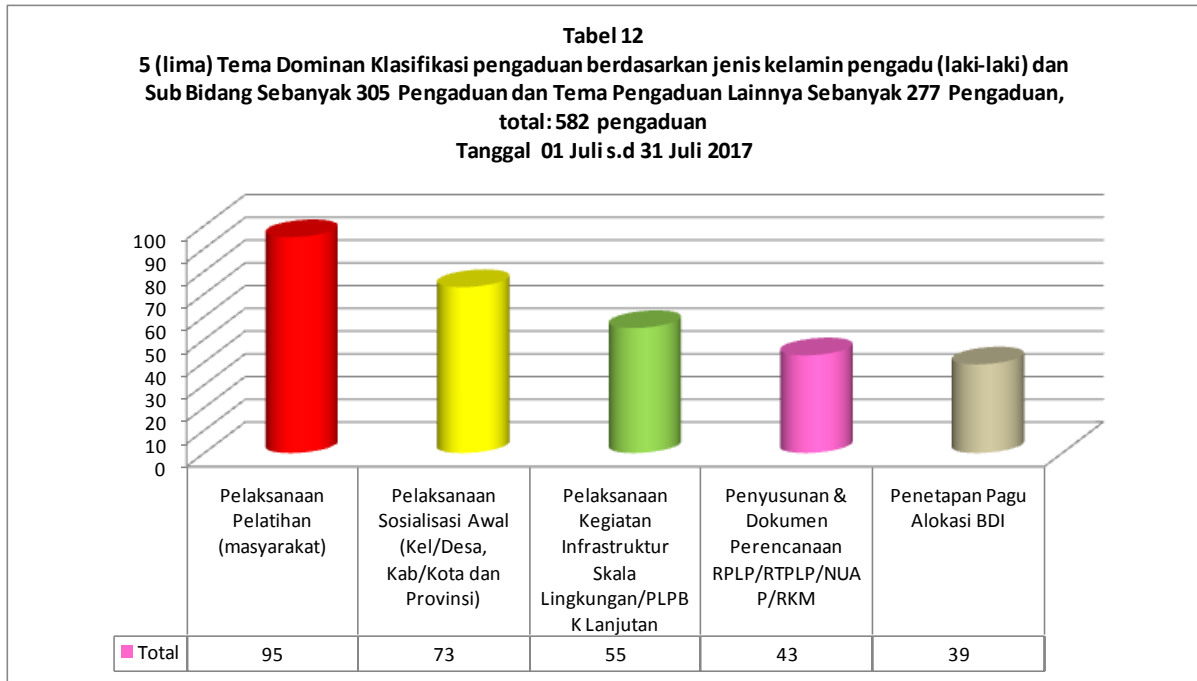
Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

PELAKU YANG DIADUKAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 11A											Grand Total	
	BALIK NEGERI	DIAKAR	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	MALUKU	NUSABARAT	NUSATENGGARA	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH		SULAWESI UTARA
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		8		1	1			2			1	75	88
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	3	15		3	5			1		5	14	11	84
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan		3		5	5		4	2	1	2	7	9	38
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1	3	1	1	4	1			1	2	4	10	28
Penetapan Pagu Alokasi BDI			1		2		1	6		1	10	4	25
Grand Total	4	29	2	10	17	1	5	11	2	10	15	125	263

8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui.

Berdasarkan data pada bulan Juli 2017 pengaduan berdasarkan jenis kelamin pengadu adalah Laki-laki dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 305 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 277 pengaduan (total 582 pengaduan).



Tabel 12a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 12A

JENIS KELAMIN PENGADU/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU WILAYAH 2

	BAL I	D I YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSANTARA BARAT	NUSANTARA TIMUR	NUSANTARA UTARA	PAPUA	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total		
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	3	12	1	1	6	1					5	1			1	6	15	10	33	95	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		6			1						2						4	1		59	73
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan		3	2		5	3	3	1	4		2	3	2	3	3			12	9		55
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUA/RKM	1	3		1	1	3	1	1		1	1	1	1			4	6	7	11		43
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1	1		1			2	1		9	1			1	3			10	9	39
Grand Total	4	25	3	2	8	13	5	4	5	1	19	6	3	5	20	22	39	121	305		

Penutup

Dalam laporan bulan Juli 2017 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 842 pengaduan (selesai 842 (100%), proses 0 (0%) pengaduan), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota pengaduannya didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (152 pengaduan) dan Provinsi DI Yogyakarta (26 pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai pelaksanaan pelatihan (masyarakat) (145 pengaduan atau 30%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai pelaksanaan sosialisasi awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi) (116 pengaduan atau 39,1%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadakan adalah pelaksanaan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (22 pengaduan atau 34,9%).

Sedangkan mengenai pengaduan yang bersifat informatif sejumlah 830 (98,6%) [selesai 830 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 12 (1,4%) [selesai 12 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan.

Bila dilihat dalam perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Juli – 31 Juli 2017 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 0,2% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%.

Sedangkan rata-rata pengaduan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 31 Juli 2017 sebesar 14%.

Adapun Provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% adalah Jawa Tengah (0,2%), Jawa Timur (2%), Bali (8%), Maluku Utara (3%), dan Papua Barat (0%).

Untuk secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Juli 2017 jumlah pengaduan yang masuk ada 842 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 100%.

Pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 253 pengaduan (selesai 253 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 394 pengaduan (selesai 394 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 184 pengaduan (selesai 184 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 11 pengaduan (selesai 11 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Pada laporan PPM ini telah seluruh Provinsi mengirimkan data pengaduannya, tetapi Provinsi Papua Barat data pengaduannya tidak sesuai dengan format SIM PPM. Untuk kenyamanan penginputan data, PPM Pusat berusaha untuk memperbaiki format isian manual PPM agar menjadi lebih mudah dan diupayakan SIM PPM On-Line berbasis website dapat segera dioperasionalkan.